

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian-kajian tentang Pemilu di Indonesia

Di antara kajian-kajian Pemilu di Indonesia, Peneliti melihat ada dua kajian yakni pertama kajian yang dilakukan oleh Afan Gaffar (1998) dan Kristiadi (1996). Kedua studi cenderung mempunyai perbedaan dan juga kemiripan. Perbedaannya antara lain: *Pertama*, studi Gaffar mempermasalahkan mengapa seseorang secara konsisten memilih partai politik tertentu, meskipun salah satu partai lain (Golkar) sebagai partai pemerintah mendapatkan sarana melakukan intimidasi serta menggiring rakyat memilih secara lebih mendasar, yaitu mengapa seseorang **memberikan dukungan** dan akhirnya **memilih Partai Politik** tertentu dalam Pemilu yang tidak kompetitif, suasana kehidupan budaya feodalistik, kesadaran politik masyarakat yang masih rendah, khususnya, pemahaman masyarakat tentang arti dan makna Pemilu sebagai mata rantai pengambilan keputusan politik yang mengikat seluruh masyarakat.

Kedua, studi Gaffar ingin mencari kejelasan pendekatan sosio-religius. Variabel penjelas lain adalah kepemimpinan, identifikasi kepartaian dan kelas masyarakat. Sedangkan studi Kristiadi tidak mengacu kepada pendekatan pilahan tiga aliran, namun menggunakan pendekatan sosio-budaya sebagai upaya menjelaskan perilaku pemilih. Pendekatan tersebut mengacu pada pola panutan yang bersumber dari budaya masyarakat paternalistik. Penolakan

terhadap konsep Geertz berdasarkan pemikiran bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di Jawa, telah mengalami perubahan yang cukup fundamental sebagai akibat proses perubahan sosial, politik dan ekonomi selama dua dasawarsa terakhir. Menurut Kristiadi analisis Geertz tiga puluh tahun yang lalu tentu saja berbeda dengan kondisi Indonesia Kontemporer, sehingga relevansi analisis Geertz perlu dipertanyakan, terutama untuk masyarakat perkotaan. Karena itu studi Kristiadi lebih sependapat dengan beberapa sarjana politik seperti Samson, Suparlan, Bachtiar, Dhofier, Nakamura dan Mul Khan, yang menegaskan bahwa kepercayaan terhadap agama tidak merupakan faktor determinan dalam menjelaskan perilaku politik. Studi ini juga mengkaji hubungan identifikasi kepartaian, tokoh panutan dengan identifikasi kepartaian seseorang yang berguna untuk mengungkapkan apakah perilaku pemilih seseorang dipengaruhi pula oleh identifikasi kepartaiannya.

Variabel lain yang diduga dapat melengkapi penjelasan perilaku pemilih adalah pemberitaan media massa dan struktur sosial dengan beberapa pertimbangan. Selama dua dasawarsa arus informasi yang cukup deras telah melanda masyarakat desa dan kota yang diperkirakan mempengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat. Sementara struktur sosial dimaksudkan untuk menjelaskan apakah terdapat perbedaan antara perilaku pemilih yang mempunyai perbedaan pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Ketiga, studi Gaffar mengambil sampel kelompok masyarakat yang relatif homogen (masyarakat desa), sementara itu studi Kristiadi mengambil sampel

masyarakat desa dan kota untuk lebih memperoleh kejelasan tentang pola perilaku pemilih dari dua jenis masyarakat yang berbeda karakternya.

Keempat, secara metodologis politik teknik analisis studi Gaffar melakukan pengukuran *voting* dengan skala nominal, sedangkan studi Kristiadi melakukan pengukuran *voting* dengan skala ordinal, sehingga ada perbedaan fundamental dalam menguji hipotesis yang diajukan. Perbedaan tersebut antara lain tercermin dalam melakukan analisis statistik. Studi Kristiadi mempergunakan analisis **regresi berganda** sedangkan studi Afan Gaffar dengan **analisis diskriminan**.

Kelima, peneliti juga melihat bahwa hasil studi Kristiadi berbeda dengan hasil studi Gaffar, khususnya dalam memahami perilaku politik seseorang dalam pemilu..

Menurut Kristiadi hal tersebut di atas disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, pemilahan tersebut tidak mencerminkan afiliasi politik. *Kedua*, meskipun terjadi perkembangan sosial ekonomi terutama semenjak pertengahan tahun 60-an, namun hal itu belum mengubah struktur sosial secara mendasar, sehingga tatanan masyarakat masih diwarnai oleh nilai paternalistik. Untuk lebih menegaskan argumentasi itu, dilakukan sampel komunitas masyarakat kota dan desa. Atas dasar pemahaman itulah studi Kristiadi lebih mengacu kepada pendekatan sosial budaya untuk menjelaskan perilaku pemilih.

Sungguhpun demikian, Peneliti juga melihat bahwa terdapat kemiripan kedua studi tersebut, terutama berkenaan dengan sifat empirik, dan analisis statistik

sebagai alat bantuan interpretasi data, serta beberapa persamaan dalam kerangka pemikiran teoritik. Meskipun studi tentang perilaku pemilih telah berkembang pesat, tetapi kerangka dasar pemikiran masih berorientasi kedua mazhab Michigan. Setelah kedua mazhab itu berkembang beberapa dasawarsa, baru muncul mazhab rasionalis (ekonomis) yang berusaha melengkapi kerangka pemikiran studi ini. Mazhab terakhir ini belum disinggung dalam studi Gaffar. Studi tentang voting dalam perkembangannya lebih merupakan peningkatan analisis kuantitatif yang mengandalkan sofistikasi metode statistik dan komputer.

Perbedaan dengan studi peneliti adalah studi peneliti lebih menekankan pada studi pemilih pada tingkat lokal kabupaten Way Kanan. Lebih kepada objek penelitian dengan menggunakan pendekatan dan teori yang kurang lebih sama.

B. Kerangka Dasar Teori

Meskipun dalam sejarah ilmu politik belum pernah dikemukakan *Grand Theory* tentang *voting*, namun sampai saat ini terdapat tiga macam teori voting yang dapat dikelompokkan dalam tiga mazhab besar. **Pertama**, teori voting dari mazhab sosiologis yang dipelopori oleh *Columbia's University Bureau of Applied Social Science*. **Kedua**, teori voting dari mazhab psikologis yang dikembangkan oleh University of Michigan's Survey Research Center.

Berbeda dengan pendekatan sosiologis yang sangat deterministic, pemikiran mazhab ini menekankan bahwa voting ditentukan oleh tiga aspek yaitu

keterikatan seseorang terhadap partai politik tertentu, orientasi seseorang terhadap calon presiden atau anggota parlemen serta orientasinya terhadap isu-isu politik. Dengan demikian identifikasi kepartaian adalah inti mazhab psikologis untuk menjelaskan perilaku seseorang memberikan suara dalam Pemilu.

Studi-studi tentang voting yang dikembangkan atas dasar pendekatan kedua mazhab tersebut tampaknya kurang memuaskan sarjana-sarjana lain. Karena itu beberapa sarjana lain mengembangkan teori voting dengan menggunakan pendekatan ekonomis atau rasional yang menekankan bahwa pemberian suara ditentukan berdasarkan perhitungan untung rugi.

Ketiga mazhab tersebut digunakan oleh sarjana politik sebagai acuan untuk memahami perilaku pemilih dinegara-negara seperti Amerika, Eropa dan Asia. Tetapi pendekatan ini tampaknya tidak dapat secara persis diterapkan untuk memahami perilaku pemilih di Indonesia, karena beberapa alasan, antara lain:

Pertama, mazhab sosiologi terlalu menekankan peranan kelas (Marxian dan Weberian), sebagai faktor yang menentukan preferensi politik. Mazhab ini juga percaya bahwa kelas merupakan basis atau landasan pengelompokan politik, sebab partai-partai politik tumbuh dan berkembang berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat yang berlainan karena kepentingan ekonomi tertentu.

Hal itu jelas tidak dikenal di Indonesia. Kalaupun terdapat "kelas-kelas" dalam masyarakat, mereka lebih merupakan pemilahan dari kelompok yang berkuasa birokrat) dengan yang dikuasai (rakyat), serta pengelompokan berdasarkan primordial.

Kedua, mazhab psikologis menitikberatkan identifikasi kepartaian, khususnya sikap seseorang terhadap isu-isu politik, calon presiden atau anggota parlemen. Ini kurang relevan karena kehidupan politik di Indonesia belum memungkinkan berkembangnya isu-isu politik yang dapat menjadi pilihan alternatif, mengingat masih dimungkinkannya dominasi isu politik oleh kekuatan sosial politik tertentu.

Ketiga, mazhab ekonomis atau rasionalitas perilaku pemilih dalam Pemilu, kurang realistis mengingat sebagian besar masyarakat belum mengenal dengan baik calon-calon anggota parlemen dan isu-isu politik yang berkembang sehingga tidak mungkin melakukan penelitian mengenai keuntungan dan kerugian yang diperoleh karena pemilu lebih dipusatkan pengenalan tanda gambar.

Tak adanya konsep Barat yang secara mutlak dapat diterapkan untuk melakukan studi empiris mengenai perilaku pemilih di Indonesia, bukan berarti teori tersebut tidak ada gunanya sama sekali. Menggabungkan ide-ide dasar ketiga mazhab tersebut diharapkan menjadi model pendekatan yang dapat menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia. Mazhab Sosiologis digunakan untuk meneliti pemilahan masyarakat yang secara besar dibagi dua kelompok yaitu penguasa (pimpinan) dan yang dikuasai (anggota masyarakat). Selain itu pengelompokan masyarakat dari aspek tingkat pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal (desa dan kota), dan lainlain dapat membantu menjelaskan perilaku memilih di Indonesia. Sementara itu mazhab psikologis diharapkan dapat memberikan prespektif internalisasi dan sosialisasi nilai

budaya, adat istiadat dan kebiasaan yang membentuk budaya politik masyarakat yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku pemilih. Penggabungan kedua pendekatan ini selanjutnya disebut pendekatan sosio cultural.

Selanjutnya Kristiadi (1996: 76) berpendapat bahwa, perilaku pemilih adalah keterikatan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor psikologis, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih atau disebut teori *voting behavioral*. Mahendra (2005: 75) mengatakan, perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu.

Ada beberapa pendekatan untuk melihat perilaku memilih menurut Surbakti (1992:145):

1. Pendekatan struktural

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai.

Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan-perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

3. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Jika di Amerika Serikat terdapat *distrik, precinct, dan ward*. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

4. Pendekatan Psikologi Sosial

Pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam model perilaku politik. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai

tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

5. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih.

Sedangkan menurut Heywood (1997: 224), melihat perilaku memilih dari beberapa model yaitu :

1. Model Identifikasi Partai

Teori paling awal dari perilaku memilih adalah model indentifikasi partai yang merupakan bagian dalam faktor psikologis, ini didasarkan pada pengaruh psikologis dari orang-orang yang menjadi anggota partai. Pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasi dari partai yang diikuti, hal ini termasuk dukungan dalam jangka panjang untuk menghormati partai sebagai partai mereka sendiri. Pemungutan suara merupakan suatu penjelmaan sikap berat sebelah, bukan produk kalkulasi

yang dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan, kepribadian, berkampanye dan pemberitaan media. Model ini mengakibatkan tekanan berat pada sosialisasi politik tingkat awal, karena melihat keluarga sebagai prinsip dasar dimana loyalitas politik dibina. Hal ini dibanyak kasus diperkuat oleh kelompok masyarakat dan pengalaman sosial dimasa lalu.

Pada model ini sikap diarahkan kepada tokoh pemimpin dan kebijakan, seperti halnya persepsi tentang kelompok kepentingan individu, ditujukan untuk menciptakan stabilitas dan kontinuitas terutama dari pola kebiasaan perilaku memilih dan terkadang berlaku seumur hidup. Dari sudut pandang ini sangatlah mungkin untuk memberikan suara yang wajar pada partai berdasarkan pada tingkat kefanatikan.

2. Model Sosiologis

Hubungan antara model sosiologis dengan perilaku memilih terhadap minat pada suatu grup didukung oleh tujuan pemilih untuk mengadopsi pola memilih yang merefleksikan posisi ekonomi dan sosial pada grup dimana mereka tergabung. Lebih dari itu pengembangan faktor psikologis yang mempengaruhi partai yang berasal dari pengaruh keluarga. Sorotan utama dari model ini adalah kepentingan dari perjanjian sosial, mencerminkan tekanan didalam kemasyarakatan. Yang paling penting untuk bagian ini adalah kelas, gender, etnisitas, agama, dan wilayah.

3. Model Pilihan Rasional

Model pilihan rasional lebih memperhatikan pendapat individu dan jauh dari sosialisasi dan perilaku kelompok sosial. Disini pemungutan suara dilihat sebagai sikap yang rasional, pemilih individu percaya untuk memilih partai dan mereka lebih memilih kepada seseorang yang diminati. Telah menjadi suatu kebiasaan ada suatu manifestasi pengaruh dan kesetiaan didalam pemungutan suara yang dianggap sebagai alat yang penting. Model pilihan rasional berbeda dalam beberapa hal seperti yang ditulis oleh V.O. Key (1966), melihat pemilih sebagai pola pikir masa lalu dalam kekuasaan partai dan bagaimana penampilannya mempengaruhi pilihan masyarakat. Selanjutnya yang paling penting adalah isu pemungutan suara dan pendapat beberapa partai dapat berpengaruh pada pilihan mereka yang dibentuk ulang oleh politik.

4. Model Ideologi Dominan

Radikal teori dalam pemilihan suara menuju kepada fokus utama dari tingkat pilihan individu yang dibentuk oleh proses dari manipulasi ideologi dan kontrol. Dibeberapa anggapan seperti beberapa perubahan teori dalam model sosiologi, pemungutan suara disebut sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki sosial dimana teori ini berbeda dengan model sosiologi, meskipun begitu bagaimana individu menginterpretasikan posisi mereka bergantung pada bagaimana mereka dilihat dari segi pendidikan oleh pemerintah dan lebih dari itu oleh media massa.

Masih berkaitan dengan perilaku pemilih, menurut Afan Gaffar yang dikutip oleh Asfar Muhammad (2005: 47) menyatakan bahwa selama ini penjelasan-penjelasan teoritis tentang voting behavior didasarkan pada tiga model pendekatan yaitu model pendekatan sosiologis, model pendekatan psikologis dan model pendekatan politik rasional.

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih.

Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan-pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik, karena kelompok-kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

2. Pendekatan psikologis

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Almond dalam Suryanef (2000) menyatakan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap dan pola tingkah laku politik serta merupakan sarana bagi generasi untuk mewariskan patokan-patokan dan keyakinan politik kepada generasi sesudahnya.

3. Pendekatan politis rasional.

Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

(Sumber:<http://fisip./uns./ac.id/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2009).

Selanjutnya secara umum ada tiga tipe perilaku memilih sebagaimana yang dikembangkan oleh Firmanzah Ph.d yang terdiri dari :

1. **Konstituen**, adalah kelompok masyarakat yang diwakili dan memiliki kedekatan dengan suatu partai politik. Kelompok masyarakat ini yang

merupakan basis pendukung kontestan. Konstituen memiliki loyalitas yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis pemilih yang lain.

2. **Non-Partisan**, adalah massa mengambang yang masih belum memutuskan partai politik apa yang mereka dukung, non-partisan tidak mengikatkan diri dengan suatu partai politik apapun. Biasanya tipe ini akan menjatuhkan pilihannya di akhir periode kampanye atau malahan mereka tidak memilih siapapun karena mereka tidak melihat satu pun dari pilihan kontestan yang sesuai dengan harapan mereka.
3. **Pendukung partai politik lain**, adalah pendukung atau konstituen pada partai politik lain. Suatu partai politik atau kontestan individu juga perlu mengembangkan hubungan dengan pendukung partai lain.

Mengacu pada kerangka pemikiran teoritik tersebut diatas maka variabel-variabel penjelas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Panutan, yaitu variabel untuk menjelaskan perilaku pemilih berdasarkan hubungan paternalistik antara anggota masyarakat dan pemimpinnya yang secara operasional dapat dibagi dalam kelompok birokrat, pimpinan agama dan pimpinan masyarakat lainnya diluar kedua jenis pimpinan tersebut. Proses sosialisasi yang menanamkan nilai kepatuhan sejak kanak-kanak mengakibatkan seseorang cenderung mempunyai sikap dan perilaku yang sama dengan sikap dan perilaku tokoh panutannya, termasuk dalam bidang politik.

Identifikasi Kepartaian, adalah variabel untuk menjelaskan perilaku pemilih dari aspek hubungan emosional antara responden dan partai politik tertentu.

Dalam masyarakat yang paternalistik kecenderungan identifikasi tokoh masyarakat dengan partai politik tertentu akan diikuti oleh anggota masyarakat yang mengakuinya sebagai tokoh panutannya. Variabel ini menjelaskan pula bahwa partai politik, yang oleh masyarakat dianggap dekat dengan tokoh panutannya, cenderung akan didukung dan dipilih pula oleh masyarakat yang mengakui pimpinan masyarakat sebagai tokoh panutannya.

Struktur Sosial, yaitu variabel yang ingin menjelaskan apakah terdapat perbedaan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tempat tinggal, struktur umur, dan perilaku pemilih.

C. Proses Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2009-2014

1. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik
 - a. Pengumuman pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh partai politik/ gabungan partai politik dan pengambilan formulir pencalonan dilaksanakan tanggal 19-21 Mei 2008.
 - b. Pendaftaran calon Gubernur dan Calon Wakil gubernur dilaksanakan pada tanggal 22-28 Mei 2008.
 - c. Pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat dilaksanakan pada tanggal 7-9 Juli 2008.
 - d. Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008.

2. Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dari Jalur Perseorangan atau Independen
 - a. Pengumuman dan penjelasan pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh perseorangan dan pengambilan contoh format dukungan dilaksanakan tanggal 5-12 Mei 2008.
 - b. Pengumuman pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh perseorangan dan pengambilan formulir pencalonan pada tanggal 19-21 Mei 2008.
 - c. Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh pasangan calon perseorangan di KPU Provinsi Lampung dilaksanakan tanggal 18-20 Juni 2008.
 - d. Pengumuman pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2008.
 - e. Penetapan, penentuan nomor urut, dan pengumuman pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2008.
3. Kampanye
 - a. Pertemuan antar peserta Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2009-2014 tentang pelaksanaan kampanye diselenggarakan oleh KPU Provinsi Lampung pada tanggal 20 Juli 2008 – 3 Agustus 2008.
 - b. Pemberitahuan tim kampanye dilakukan tanggal 1-3 Agustus 2008.
 - c. Masa Kampanye Terbuka dilaksanakan pada tanggal 17-30 Agustus 2008 yang jadwal kampanye telah ditentukan oleh KPU Provinsi Lampung.
 - d. Masa Tenang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus-2 September 2008

4. Sosialisasi Pemilihan Gubernur Lampung Periode 2009-2014 Oleh KPU Provinsi Lampung. Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat dilaksanakan KPU Provinsi Lampung pada tanggal 3 Maret–30 September 2008. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk pemasangan baliho, spanduk, iklan di media massa, poster dan pengumuman kepada aparat pemerintahan yang dilaksanakan tiap kecamatan di Provinsi Lampung. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan dana maka sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Provinsi Lampung.

D. Kerangka Pikir

Sebagai perwujudan dari bentuk partisipasi rakyat dan terutama dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat sangat dibutuhkan sarana artikulasi yang dapat mewadahi dan mewakili partisipasi politik tersebut. Salah satu perwujudan dari bentuk partisipasi politik rakyat adalah melalui pemilihan kepala daerah yang merupakan wadah terpenting dalam memenuhi dan keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah dan tujuan sebuah provinsi.

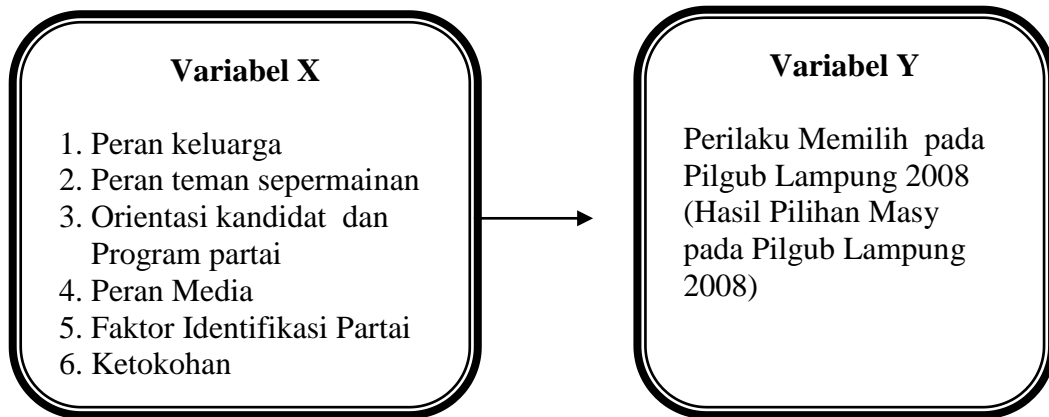
Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, pemilihan kepala daerah (Pilkada) seharusnya mampu berfungsi memberikan pendidikan politik dan meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga tercipta kondisi negara yang benar-benar demokratis, terutama bagi para pemilih masyarakat pedesaan yang *notabene* rata-rata masih berpendidikan rendah. Mereka harus mampu memanfaatkan hak pilih mereka dalam pemilihan Gubernur dengan sebaik-baiknya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak indikator yang dapat

mempengaruhi mereka sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya pada pemilihan Gubernur, seperti pengaruh faktor sosiologi yang terdapat didalamnya. Lalu faktor rasionalitas, yaitu apakah mereka memilih karena didukung oleh pengetahuan mereka tentang program partai baik langsung maupun melalui media, ataupun kandidat yang akan mereka pilih, dan juga adanya pengaruh psikologis dalam diri pemilih, salah satu konsep psikologis sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan Gubernur berupa identifikasi partai.

Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang mengukung calon Gubernur atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Faktor psikologis lainnya yang dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seseorang memilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh atau pemimpin yang bernaung di atasnya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengetahui bagaimanakah faktor sosiologis, faktor pilihan rasional dan faktor psikologis mempengaruhi perilaku memilih pemilih masyarakat pedesaan di Kabupaten Way Kanan. Agar lebih mudah dalam memahami penelitian ini,

berikut adalah bagan dari kerangka pikir penelitian ini :



Ket : —→ : Mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka Pikir